

Abstrak

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan hidup masyarakat di tiap daerah. Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 telah berdampak ke berbagai bidang yang merugikan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah untuk penanganan pandemi tersebut yaitu dengan cara realokasi dan refocusing APBD untuk pencegahan dan penanganan dampak COVID-19. Diawali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melakukan refocusing, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD. Kondisi abnormal tersebut mendorong penulis untuk menyusun karya tulis tugas akhir ini. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian pengelolaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah terhadap prioritas penggunaan dana dan peraturan perundang-undangan, serta meninjau pengelolaan atas realokasi dana untuk penanganan COVID-19. Ruang lingkup penelitian ini mencakup penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2020. Metode pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang sudah terkumpul digunakan untuk meninjau kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 dalam hal penyesuaiannya, legalitasnya, alokasinya, dan realisasinya. Dalam penelitian ini juga terdapat identifikasi mengenai kendala beserta solusi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan APBD untuk penanganan COVID-19 di Kota Pekalongan pada tahun 2020 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata kunci: Kota Pekalongan, Pandemi COVID-19, APBD, Realokasi, Refocusing, Realisasi.

Abstract

Regional Government Budget (APBD) is one of the essential components in the survival of the community in each region. The COVID-19 pandemic in early 2020 impacted various fields that harmed society. One of the government's efforts to deal with the pandemic is by reallocating and refocusing the APBD to prevent and handle the impact of COVID-19. Beginning with Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020, the central government gives local governments the authority to refocus, change allocations, and use APBD. This abnormal condition prompted the writer to compose this final thesis. This study aims to review the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget against the priority use of funds and laws and regulations, as well as the management of the reallocation of funds for handling COVID19. The scope of this research covers the handling of COVID-19 in Pekalongan City in the 2020 Fiscal Year. The collection method in this research uses data in the form of library research and field studies. The data collected is used to review adjustments between regulations and the implementation of the APBD for handling COVID-19 in terms of adjustments, legality, allocation, and realization. In this study, there are also problems regarding and solutions. Based on the research that has been done, in general, it can guarantee that the use of the APBD for handling COVID-19 in Pekalongan City in 2020 is per applicable regulations.

Keywords: Pekalongan City, COVID-19 Pandemic, APBD, Reallocation, Refocusing, Realization.